

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terkait ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan sejak lama, seiring dengan penelitian-penelitian sebelumnya tentang ketimpangan wilayah.

Rubiarko (2013) dalam Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur (2008-2011)” berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan tingginya tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. dan variabel terikat penyesuaian pendapatan dan variabel bebas input bruto (APK). Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur dan hubungannya baik, pendapatan tinggi tidak berpengaruh signifikan namun berhubungan baik dengan kepadatan. Penelitian Yuliani (2015) mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Kalimantan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembangunan dan pendapatan antar wilayah Kalimantan Timur serta menguji kebenaran hipotesis Kuznets U di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indeks Williamson, kurva Couznet dan indeks entropi Thiel. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dengan menggunakan indeks Williamson. Saat ini menggunakan analisis Couznet menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menggunakan hukum Couznet pada tahun 2010-2012. Penelitian Bantika (2015) berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah jumlah penduduk, tingkat pertanian dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan

distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Utara. Beberapa metode analisis regresi linier telah digunakan dalam penelitian ini..

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan indeks Gini dan peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan indeks Gini di Sulawesi Utara. Penelitian Afriza (2014) berjudul Menjaga Kesenjangan Pendapatan Antar Daerah/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Pemberdayaan Pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada era desentralisasi fiskal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada era desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan metode analisis indeks Williamson dan indeks Theil Entropy yang dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda dengan uji klasikal. Penelitian Mopangga (2010) berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur perekonomian dengan mengukur besarnya ketimpangan pembangunan yang bersumber dari ketimpangan proporsional PDRB per kapita, IPM, dan rasio belanja infrastruktur. Alat analisis yang digunakan adalah: indeks Gini, indeks Williamson, moving average, indeks Klassen dan reduksi kelompok data. Variabel yang digunakan adalah ketimpangan pendapatan (indeks Gini) sebagai variabel terikat dan variabel bebas pertumbuhan ekonomi per kapita, jumlah penduduk, indeks pembangunan ekonomi dan hubungan biaya konstruksi dengan ketimpangan pembangunan (indeks Gini). PDB, indeks pembangunan manusia, dan konsumsi infrastruktur dipengaruhi oleh ketimpangan..

B. Landasan Teori dan Kajian Pustaka

1. Perhitungan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah

Mengikuti Qiao dkk. (2002), ukuran ketimpangan ini didasarkan pada konsep PDRB per kapita relatif. Dengan pemerataan sempurna atau kondisi pemerataan yang ideal, PDRB per kapita per daerah harus sama dengan rata-rata nasional untuk semua daerah pada tahun tertentu.

Kemudian, ukuran ketimpangan adalah jarak dari bagian relatif ke bagian yang sama sempurna. Untuk departemen-departemen dengan PDRB per kapita relatif awal yang lebih tinggi dari satu, peningkatan pangsa mereka mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal mengarah pada ketimpangan yang lebih besar, sementara penurunan berarti hasil yang lebih adil. Demikian pula, ketimpangan akan meningkat jika daerah-daerah yang memiliki pangsa relatif awal kurang dari satu mengalami penurunan pangsa yang lebih jauh, menjauh dari satu akibat desentralisasi fiskal. Semakin besar jarak secara absolut, semakin tinggi ketimpangan pendapatan daerah.

$$I_{i,t} = \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1$$

sumber : jurnal ketimpangan pendapatan

Dimana

$I_{i,t}$ = ketimpangan pendapatan regional

$PCGDP_{i,t}$ = PDRB per kapita kab/kota provinsi jawa tengah

$PCGDP_{NAL,t}$ = PDRB per kapita provinsi jawa tengah

2. Ketimpangan Pendapatan

Secara teoritis, Simon Kuznets (1955) berpendapat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur perekonomian antar daerah, dimana pada daerah maju terkonsentrasi pada sektor industri dengan produktivitas tinggi, sedangkan daerah tertinggal masih terkonsentrasi pada sektor tradisional (Todaro dan Smith, 2009). Kemudian ketimpangan tersebut berangsur-angsur berkurang seiring dengan berlanjutnya tahap pertumbuhan sehingga bila digambarkan dengan kurva akan membentuk U terbalik (Todaro, 2004). Selanjutnya Gunnar Myrdal. (1957), mengemukakan bahwa ketimpangan ekonomi disebabkan oleh efek umpan balik yang kuat dan efek penyebaran yang lemah di negara-negara berkembang. Backwash effect sendiri diartikan sebagai dampak negatif dimana perekonomian maju yang menjadi pusat pembangunan ekonomi akan merugikan perekonomian di wilayah lain,

sedangkan spread effect merupakan dampak positif dimana perekonomian maju dari pusat pembangunan ekonomi akan menyebar ke berbagai wilayah. wilayah lain..

Simon Kuznet. (2017), mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan. Menurut Kuncoro.(2001), konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia.

Ketimpangan atau disparitas antar wilayah merupakan hal yang lumrah dalam kinerja perekonomian suatu wilayah. Hal ini terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan demografi masing-masing daerah. Perbedaan ini akan membedakan kemampuan daerah dalam mendorong kegiatan pembangunan. Menurut Kankuro (2006), ketimpangan mempengaruhi cara hidup masyarakat. Menurut Socierno, perbedaan inilah yang menjadikan tingkat pembangunan di berbagai daerah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan tempat atau tempat hidup di berbagai daerah. (2010), efek polarisasi terjadi ketika daerah pusat berkembang menghasilkan produksi lebih banyak dibandingkan daerah kecil, sehingga perekonomian daerah kecil lebih lemah. Selain itu, pekerja akademis dan profesional terkonsentrasi di daerah maju, sehingga sebagian besar pekerja di daerah kecil adalah pekerja terampil, menurut Hermawan. (2005), karena perluasan dampak pembangunan dan dampak pengurangan terjadi jika terdapat keterkaitan antara lokasi universitas dan daerah kurang berkembang, dimana permintaan akan lokasi perumahan meningkat. Permintaan bahan baku dari daerah tertinggal Menurut Adisasmita, daerah pusat pertumbuhan juga dapat mengurangi pengangguran laten di daerah kecil. (tahun 2014).

Terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari aktivitas sektor-sektor yang ada dalam perekonomian. Menurut Richardson, untuk melihat daerah-daerah yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian daerah. (2001) dan Golson. (1997), metode atau pendekatan model perekonomian daerah adalah analisis basis ekonomi. Model ekonomi dasar menekankan pada perluasan ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi di kawasan.

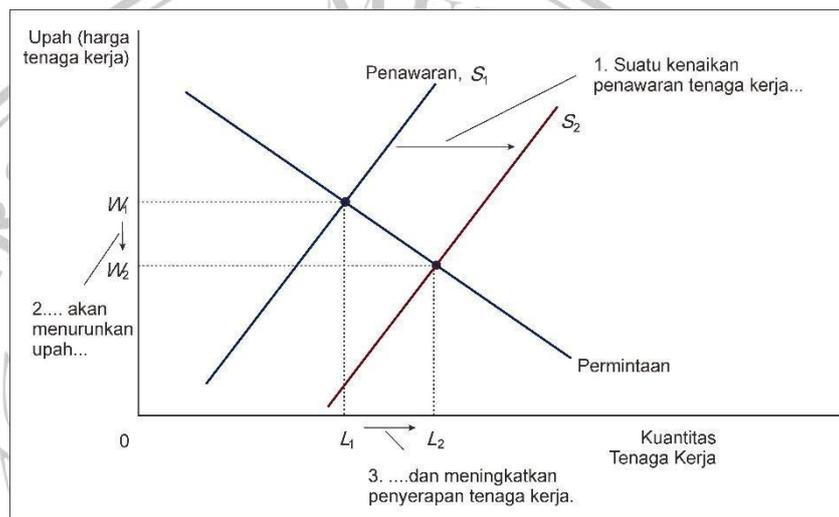
Ketimpangan antar wilayah dikemukakan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan neoklasik. Dalam teori ini terdapat prediksi mengenai hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah, maka hipotesis ini disebut dengan hipotesis neoklasik. Dalam hipotesis neoklasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin meningkat. Tren ini berlanjut hingga puncak ketidakpastian. Jika proses pembangunan terus berjalan maka ketidakpastian pembangunan akan berkurang..

Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga akan terlihat peran sektor-sektor potensial dalam pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin dari perkembangan PDRB dan sektor-sektornya. Pola pertumbuhan ekonomi dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Tipologi Klassen (Widodo, 2006) dapat diklasifikasikan menjadi: (a) Daerah Bertumbuh Maju dan Cepat; (b) Daerah Maju namun Tertekan; (c) Daerah Berkembang Pesat; (d) Daerah yang Relatif Terbelakang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masalah ketimpangan wilayah. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan ketimpangan pembangunan ekonomi antar berbagai wilayah di suatu wilayah yang juga akan menyebabkan ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar wilayah. Untuk

menghitung ketimpangan wilayah digunakan indeks ketimpangan Williamson dan indeks ketimpangan entropi Thiel (Kuncoro, 2004).

3. Pengangguran

Faktor yang dapat mempengaruhi adanya pengangguran di Indonesia karna ketidakseimbangannya penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia hal ini yang menyebabkan tidak seimbang nya penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Berikut diagram pergeseran penawaran tenaga kerja :



Sumber; wartailmu 2021

Gambar 2.1. Kurva Penawaran dan Pergeseran Tenaga Kerja

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat Pergeseran dalam Penawaran Tenaga Kerja. Ketika penawaran tenaga kerja meningkat dari S_1 menjadi S_2 , maka upah ekuilibrium akan turun dari W_1 menjadi W_2 . Dengan upah yang lebih murah ini, perusahaan-perusahaan akan merekrut lebih banyak tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja pun meningkat dari L_1 menjadi L_2 . Perubahan upah mencerminkan adanya perubahan nilai produk marginal tenaga kerja: Dengan adanya lebih banyak pekerja, tambahan output yang dihasilkan setiap adanya penambahan pekerja menjadi lebih kecil

a. Jenis-Jenis Pengangguran

Jenis-jenis pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan sumber atau penyebabnya

2) Berdasarkan ciri cirinya.

Pengangguran ditinjau dari sumbernya dapat digolongkan menjadi:

- 1) Pengangguran Normal
- 2) Pengangguran normal adalah pengangguran yang disebabkan oleh keinginan pekerja-pekerja untuk mencari kerja yang lebih baik atau yang lebih baik atau sesuai dengan target yang diinginkan.
- 3) Pengangguran Siklikal
- 4) Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan naik turunnya kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
- 5) Pengangguran Struktural
- 6) Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang.

b. Dampak Pengangguran

Menurut Asafia Morni (2006), pengangguran mempunyai konsekuensi negatif terhadap stabilitas ekonomi serta stabilitas sosial dan politik. Pengangguran mengganggu stabilitas perekonomian karena tingginya pengangguran menurunkan daya beli masyarakat sehingga menurunkan upaya memproduksi barang atau jasa. Dampak negatif lain dari pengangguran terhadap perekonomian adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, menurunnya investasi, menurunnya penerimaan pajak yang diterima pemerintah, dan keuntungan riil produk domestik bruto (PDB), yang lebih rendah dari perkiraan. PDB mungkin disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang tidak digunakan secara efisien. Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan banyak masalah sosial seperti meningkatnya kejahatan, penyalahgunaan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya. Pengangguran mempengaruhi kondisi mental seseorang menyebabkan banyak orang menderita depresi dan bunuh diri. Selain itu, pengangguran menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga menimbulkan berbagai protes, petisi dan demonstrasi yang

mengancam stabilitas negara. Salah satu penyebab utama terjadinya pengangguran adalah ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Saat ini negara-negara berkembang sedang menghadapi permasalahan migrasi penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota, yang berdampak pada menurunnya nilai pertanian, meningkatnya angka pengangguran dan pengangguran di desa dan kota..

Dampak buruk pengangguran terhadap ekonomi dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran berarti masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kesejahteraannya. Pengangguran berarti pendapatan nasional lebih kecil dari pendapatan nasional. Situasi ini berarti bahwa standar hidup masyarakat lebih rendah dari yang seharusnya
- 2) Pengangguran mengurangi pendapatan pajak pemerintah. Pengangguran disebabkan oleh berkurangnya aktivitas ekonomi, dan berkurangnya aktivitas ekonomi menyebabkan pajak pemerintah menjadi lebih rendah. Dengan demikian, tingginya pengangguran mengurangi kemampuan pemerintah dalam mengendalikan aktivitas perekonomian.
- 3) Pengangguran tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mempunyai dua konsekuensi negatif bagi dunia usaha di sektor swasta. Pertama, pengangguran karyawan meningkatkan kapasitas mesin perusahaan. Situasi ini tidak mendorong mereka untuk berinvestasi untuk masa depan. Kedua, pengangguran yang disebabkan oleh lambatnya aktivitas bisnis mengurangi keuntungan. Keuntungan yang rendah mengurangi kebutuhan akan investasi. Kedua faktor di atas tidak akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi di masa depan.

C. Hubungan Pengangguran dengan Ketimpangan Pembangunan

Seperti Asafia Moreni (2006) menyatakan, pengangguran menurunkan daya beli masyarakat sehingga mengurangi pendapatan pemerintah daerah berupa pendapatan pajak, karena pengeluaran pemerintah untuk membiayai

pembangunan daerah akan berkurang sehingga menyulitkan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan manusia, (IPM) digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah, dengan mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam empat kategori status pembangunan manusia yang telah dikeluarkan oleh UNDP. Empat kategori tersebut yaitu :

- a Rendah bila angka $IPM < 50$,
- b Menengah bawah bila angka $50 < IPM < 66$,
- c Menengah atas bila angka $66 < IPM < 80$,
- d Tinggi bila angka $IPM > 80$

Salah satu aspek terpenting dari kualitas hasil pembangunan ekonomi yaitu pembangunan manusia. IPM merupakan indeks yang didasarkan pada tiga indikator yaitu:

- a kesehatan;
- b pendidikan yang dicapai
- c standar kehidupan.

Jelas bahwa ketiga aspek tersebut sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Ketiga faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketersediaan lapangan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah (Fitriyah dan Rachmawati (2012)). IPM menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan lebih besar dibandingkan kesenjangan pada indikator pembangunan lainnya, setidaknya pada indikator kesehatan dan pendidikan. IPM juga mengindikasikan bahwa pembangunan diartikan sebagai pembangunan manusia dalam arti luas, bukan pertumbuhan pendapatan. Kesehatan dan pendidikan bukan satu-satunya kegiatan produktif, tetapi juga merupakan tujuan utama pembangunan (Todaro dan Smith, 2004: 87)..

2. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dalam Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan

Komponen IPM yaitu angka harapan hidup diukur dengan angka harapan hidup yang dihitung dengan metode tidak langsung (*metode Brass, varians Trussel* berdasarkan variabel rata-rata umur anak hidup dan rata-rata umur anak lahir. Tingkat pendidikan diukur dengan tingkat melek huruf dan rata-rata lama pendidikan yang dihitung dari data surveyor tunanetra. Indeks pembangunan manusia dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah mempengaruhi taraf hidup penduduk wilayah tersebut. Peran tingkat pendidikan formal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan lama pendidikan, meningkatkan lapangan kerja dan upah dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Jika harga mencerminkan produktivitas, semakin banyak orang dengan pendidikan tinggi akan meningkatkan produktivitas dan output perekonomian. Hal ini sejalan dengan teori human capital yaitu pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi karena pendidikan membantu meningkatkan produktivitas pekerja (Jhingan, 2010).

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia. Unsur-unsur tersebut adalah usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Metode perhitungan IPM yang diukur dengan 3 komponen tersebut dengan membuat indikator maksimum dan minimum yaitu :

$$\text{Indeks } X(i) = [X(i) - X(i)min] / X(i)maks - X(i)min]$$

Keterangan :

$X(i)$ = indikator ke 1 (I=1,2,3)

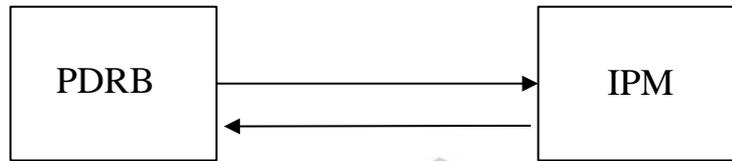
$X(i)min$ = nilai minimum

$X(i) X(i)maks$ = nilai maksimum $X(i)$

Kisaran nilai minimum dan maksimum adalah:

- a. Harapan hidup kelahiran : 25-85
- b. Tingkat melek huruf : 0-100
- c. Rata-rata lama sekolah : 0-100

PDRB dan Ketimpangan pendapatan ekonomi memiliki hubungan yang saling keterkaitan satu sama lain (Fitriyah dan Rachmawati, 2012). Keterkaitan antara PDRB dan Ketimpangan ekonomi yang diukur dalam PDRB sebagai berikut:



Keterangan :

PDRB = Produk domestic regional bruto

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

⇔ = Keterkaitan antara ketimpangan pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber pendanaan pembangunan daerah yang kurang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan daerah, sehingga pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari daerah. Sumber daya tersebut berasal dari pajak daerah, pajak daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya yang cukup besar. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Sumber PAD adalah pajak daerah, pajak daerah, pendapatan usaha daerah dan capital gain lokal (Varsito, 2001: 128). Saat ini pendapatan utama daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, perimbangan distribusi, hasil pengelolaan khusus nilai-nilai lokal, dan lain-lain (Harlina Rahman, 2005 : 38).

Pendapatan dasar daerah merupakan peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai pengeluaran yang ditentukan di daerah, terutama untuk kebutuhan sehari-hari, guna meningkatkan pendapatan seluruh daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, pajak daerah, dan pengelolaan dana khusus pendapatan daerah serta dana daerah lain yang diperuntukkan, yang bertujuan untuk memudahkan daerah dalam memungut bea cukai. Dengan

menjalankan otonomi. Untuk mengilustrasikan konsep pembagian. Sumber pendapatan asli daerah, yaitu:

- a. Pajak lokal
- b. Pajak daerah, terdiri dari: iuran umum atas jasa, retribusi jasa usaha, dan retribusi tertentu
- c. Hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri
- d. Hasil daerah lain yang sah, atau hasil penjualan barang milik daerah yang tidak terbagi, hasil penggunaan atau pemanfaatan barang milik daerah yang tidak terbagi, titipan penglihatan, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih kurs rupiah dengan sehubungan dengan mata uang asing, komisi, diskon atau bentuk lain setelah penjualan dan perolehan barang dan jasa oleh daerah.

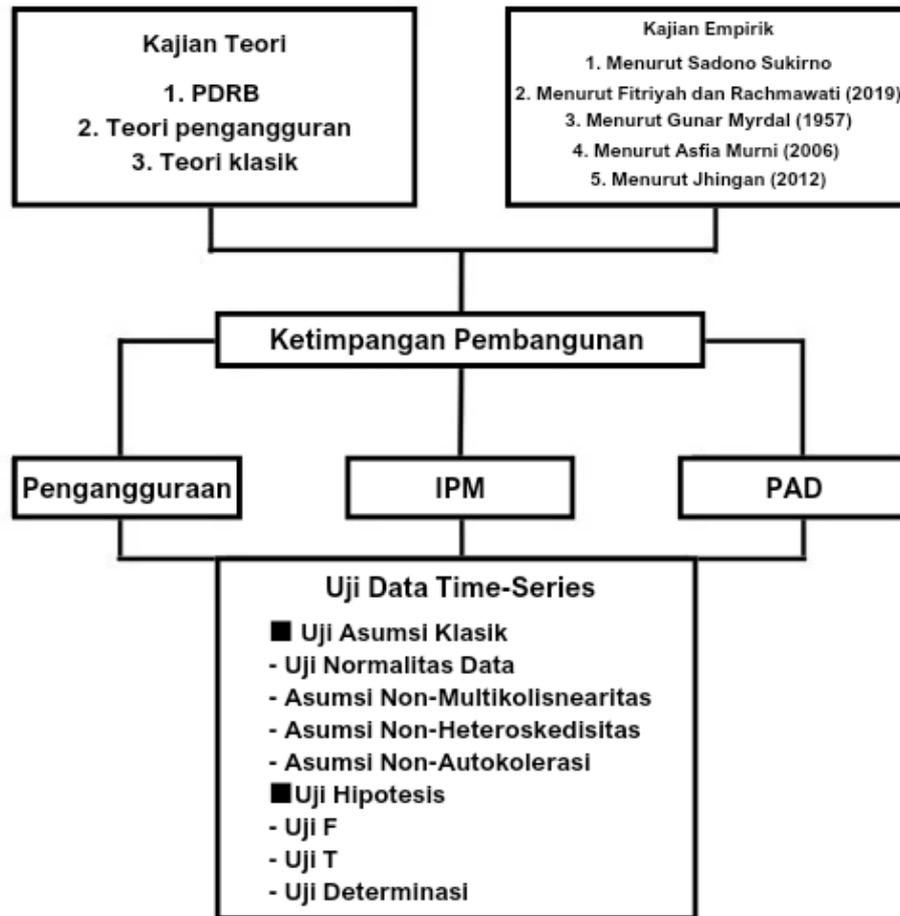
4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ketimpangan Pembangunan

PAD adalah penyebab yang sangat berpengaruh kepada ketimpangan pembangunan. Menurut Siddiq (2002), kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan berbeda-beda, tergantung pada keadaan masing-masing daerah, apakah mempunyai sumber daya yang banyak atau tidak. atau wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi atau rendah. Akibat perbedaan tersebut, suatu daerah mempunyai kekuatan yang berbeda-beda dalam kegiatan perekonomiannya. Oleh karena itu, tidak heran jika suatu daerah biasanya merupakan daerah yang sudah maju dan belum berkembang. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat di antara daerah-daerah tersebut diharapkan dapat berkurang.

5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu serta pengkajian antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Sadonono,dkk,

6. Hipotesis

Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin sebaiknya benar atau salah. Berdasarkan tujuan penelitian, maka kerangka pemikiran diajukan hipotesis sebagai berikut: Diduga adanya Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan PDRB terhadap Ketimpangan ekonomi Antar Wilayah di Provinsi Jawa pada Tahun 2016-2020.